

**INOVASI E-PILKADES DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA KANDANGAN KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN
KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

INDRA SIHABUL FAQOMI

NIM: E04213038

**JURUSAN FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : INDRA SIHABUL FAQOMI

NIM : E04213038

Jurusan : Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Juli 2018

Penulis yang menyatakan,



INDRA SIHABUL FAQOMI

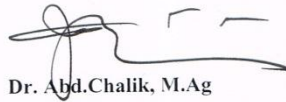
NIM : E04213038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Indra Sihabul Faqomi** ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, **17** Juli 2018

Pembimbing



Dr. Abd. Chalik, M. Ag

NIP. 197306272000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh **Indra Sihabul Faqomi** ini telah dipertahankan di depan


Tim Penguji Skripsi
Surabaya, Juli 2018

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Eschuluddin dan Filsafat
Ph. Dekan,

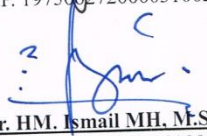


Dr. Suhermanto, M.Hum.
NIP. 196708201995031001

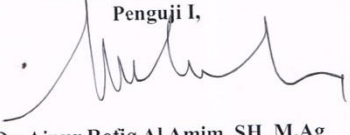
Tim Penguji :
Ketua,



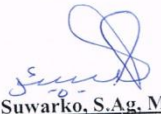
Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031002



Dr. HM. Ismail MH. M.Si
NIP. 196005211986081001
Penguji I,



Dr. Ainur Rofiq Al Amim, SH. M.Ag
NIP. 1972062522005011007
Penguji II,



Andi Suwarko, S.Ag. M.Si
NIP. 197411102003121004
Sekretaris,



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indra Sihabul Faqomi
NIM : E04213038
Fakultas/Jurusan : Uskhluddin / Filsafat Politik Islam
E-mail address : indrasihabul_faqomi@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

INOVASI E-PILKADES DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI
DESA KANDANGAN KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN KABUPATEN
GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9, Agustus 2018

Penulis

(Indra Sihabul Faqomi)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Inovasi E-Pilkades Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2017 ini memfokuskan kajiannya pada dua permasalahan. Pertama, bagaimana proses penerapan sistem inovasi e-Pilkades dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Kedua, apa saja manfaat dan tantangan dalam menerapkan sistem inovasi e-Pilkades di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan seluruh objek penelitian. Informan ditentukan secara *purposive sampling* yang menekankan pada para aktor yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data diperoleh secara primer meliputi Dispendukcapil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintahan desa, dan masyarakat Desa Kandangan, serta sumber data sekunder dari kajian kepustakaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, metode observasi, dokumentasi.

Kajian ini menggunakan teori Inovasi dan teori Kebijakan Publik yang menganalisis bagaimana proses penerapan inovasi e-Pilkades dan apa saja hambatan dalam menerapkan inovasi e-Pilkades di Desa Kandangan. Dalam penerapan inovasi e-Pilkades ini tidak semuanya bisa berjalan dengan lancar. Apalagi inovasi ini baru diterapkan oleh Kabupaten Gresik untuk pertamakali dalam pemilihan Kepala Desa serentak. Dalam hal ini yang menjalankan inovasi ini adalah Dispendukcapil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dibuatnya inovasi e-Pilkades ini adalah untuk mencegah adanya calon pemilih dengan surat suara ganda dan memastikan bahwa orang yang mempunyai hak pilih saja yang bisa memilih bukan orang lain yang menggantikannya. Dalam proses penerapannya dilapangan memang sangat dibutuhkan apalagi banyak masyarakat Desa Kandungan yang antusias terkait inovasi ini. Selain itu juga ada beberapa manfaat dalam penerapan e-Pilkades ini antara lain; validasi data, memberikan pemahaman tentang teknologi pemerintah masakini, dan mengurangi kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Selain manfaat ada juga tantangan dalam penerapan e-Pilkades yaitu lamanya alat *fingerpint* untuk membaca sidik jari calon pemilih. Dibandingkan dengan pendataan sistem manual, sistem e-Pilkades dianggap lebih lama dikarenakan sidik jari masyarakat basah ataupun sudah tua sehingga saat ditempelkan di *fingerpint* susah untuk dideteksi.

Kata Kunci :Inovasi, Kebijakan, Penerapan, ManfaatdanTantangan e-Pilkades

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| HALAMAN SUB JUDUL | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I :PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Peneliti Terdahulu | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II :KERANGKA TEORI | |
| A. Inovasi | |
| 1. PengertianInovasi | 20 |
| 2. JenisdanCiri-CiriInovasi..... | 25 |

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana segenap rakyat ikut turut serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.¹ Demokrasi mengizinkan rakyatnya untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Salah satu cara untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat dipungkiri banyak aksi kecurangan, baik dalam hal pendataan calon pemilih, ataupun dalam proses penghitungan surat suara. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah inovasi untuk menjaga kelancaran pesta demokrasi.

Inovasi dalam hal ini sangat penting karena selain untuk menjaga kelancaran pesta demokrasi, juga dapat menjaga rasa percaya masyarakat terhadap hasil voting baik dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan kepala desa. Selain itu pentingnya Inovasi dalam pemilihan kepala desa karena berkembangnya ilmu teknologi, yang mana pemilihan yang biasanya

¹Sulastrri, Leni Natalia Zulita, "E-Votting Pemilihan Walikota Bengkulu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu", Jurnal Media Infotama, Vol.11 No. 2 (September, 2015), 181

²Handrini Ardiyanti, “Uji Coba E-Verifikasi dan Masa Depan Pemilu Elektronik 2019”, Jurnal Tidak di Terbitkan, Vol.8 No.15 (Agustus, 2016), 17.

prosesnya, pemilihan kepala desa melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Calon kepala desa yang mempunyai perolehan suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa disahkan menjadi kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014). Proses pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara (Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 33 Ayat (2)). Warga yang mempunyai hak pilih datang ke TPS (tempat pemungutan suara) pada saat hari pemilihan berlangsung. Kemudian warga desa masuk ke bilik pemilihan dan melakukan pemilihan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara dan memasukkannya ke kotak suara.

Seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi, pemilihan kepala desa yang biasanya dilakukan secara manual, sekarang ini bisa dilakukan secara elektronik. Pemilihan kepala desa yang dilakukan dengan teknologi informasi disebut dengan elektronik Pilkades (e-Pilkades). Penerapan inovasi e-Pilkades diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi saat proses pemilihan kepala desa yang sedang berlangsung. Selain mengatasi permasalahan dalam pemilihan kepala desa, e-Pilkades juga mampu menghemat waktu dalam pelaksanaannya. Dalam penggunaan e-Pilkades tidak lagi menggunakan catatan untuk mencari daftar nama calon pemilih tetap. Akan tetapi cara yang digunakan

Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang pertama kali menerapkan pemerintahannya berbasis teknologi (*e-government*) di Jawa Timur. *E-government* merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakatnya kapan dan dimanapun mereka bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan yang pemerintah berikan kepadanya.³ Pemerintah Kabupaten Gresik membangun pemerintahan berbasis teknologi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dalam pembuatan inovasi e-Pilkades untuk menghubungkan layanan pemerintah dengan masyarakat. Salah satu penerapan *e-government* di Kabupaten Gresik adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang ada di Kabupaten Gresik. Salah satu desa yang dijadikan sebagai penerapan *e-government* adalah Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, yang mana dalam pemilihan kepala desa menggunakan sistem yang diberi nama e-Pilkades.

³Ibid., 17

Dari latar belakang di atas penulis ingin melihat lebih dalam terkait proses pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem inovasi e-Pilkades di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Serta ingin melihat apa saja manfaat dan tantangan dalam penerapan sistem inovasi e-Pilkades di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik terkait inovasi e-Pilkades. Dengan judul penelitian “Inovasi E-Pilkades Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik”.

Beberapa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini, adalah sebagai berikut :

[illegible]

- ### C. Tujuan

1. Untuk mengetahui proses penerpan sistem inovasi e-Pilkades dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Kandangan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui Apa sajamanafaat dan tantangan dalam menerapkan sistem inovasi e-Pilkades diDesa Kandangan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat membawa beberapa manfaat yang kemudian dapat dikembangkan dikemudian hari. Adapun manfaat penelitian ini sebagaimana berikut:

- [illegible]

- ## E. Penelitian Terdahulu

1. Dalam Jurnal yang berjudul “*Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronik Voting (E-Voting) di Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan*” yang ditulis oleh Fernandes Simangunsong dan Taufiq Anshari Rasak, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ilmu Politik dan Komunikasi, Bantaeng.⁵ Penelitian disini menjelaskan tentang kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam melaksanakan pemilihan kepala desa serentak melalui metode *electronic voting* (e-voting). Dalam penelitian ini juga membahas tentang faktor pendukung serta faktor penghambat kinerja BPMPD dalam melaksanakan pemilihan desa serentak melalui metode *electronic voting* (e-voting). Ada dua faktor pendukung yang *Pertama*, faktor internal dalam pemberian penghargaan atau *reward* berupa tunjangan honor kepada setiap pegawai BPMPD yang terlibat dalam pelaksanaan pilkades melalui metode e-voting. Yang

[illegible]

⁶Satya Mahardika, *“Implementasi Kebijakan Electronic Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boyolali”*, Jurnal Politic and Government Studies. Vol. 6 No. 2 (Juni, 2017), 52-54.

sistem e-voting dapat diberdayagunakan sejak pendataan calon pemilih,

- ani Purwati, "Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah
ilkada)", Jurnal Bianglala Informatika, Vol.3 No.1 (Maret, 2015).

⁸Nani Purwati, “*Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*”, Jurnal Bianglala Informatika, Vol.3 No.1 (Maret, 2015).

- ⁹Muhammad Kifli Hutagalung, “*Perancangan Perangkat E-voting Berbasis E-KTP*”. Jurnal Saintikom. Vol. 1 No. 1 (Agustus, 2012), 48.

Yang menjadi perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian skripsi yang berjudul “Inovasi E-Pilkades dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik”. Kabupaten Gresik merupakan Kabupaten pertama yang menerapkan sistem elektronik dalam pemilihan Kepala Desa di Jawa Timur. Dalam pemilihan kepala desa sering kali terjadi kecurangan baik itu di pendataan ataupun dipenghitungan suara. Untuk itu Kabupaten Gresik membuat sebuah inovasi untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa. Diharapkan inovasi ini bisa dijadikan contoh dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten lain.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Polres Trenggalek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) sesuai dengan obyek yang dipilih sebagai deskripsi komunitas secara langsung (data sebenarnya) di lapangan.¹⁰

Dimana penyajian data tidak dilakukan secara *numeric* sebagaimana penyajian data pada pendekatan kuantitatif. Dari sisi *metodeologis*, tata cara

[illegible]

Menurut Sugiyono, penelitian itu bermacam-macam jenisnya, dan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan analisis jenis data. Dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan adalah berupa penelitian yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif analisis yaitu metode dimana penulis mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari objek penelitian dan literature-literatur lainnya. Kemudian menguraikan secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya.¹¹

Sedangkan, metode deskriptif kualitatif yang berbasis studi kasus yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan dengan cara deskripsi melalui kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah.¹²

¹²Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),6.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul yang digunakan oleh penulis, maka penelitian ini dilakukan di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena di Desa Kandangan merupakan satu-satunya desa yang berhasil dalam penerapan sistem inovasi e-Pilkades. Sedangkan waktu penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2018. Waktu pelaksanaan tersebut dilakukan sesuai dengan surat izin penelitian yang diberikan oleh Akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

3. Penentuan Informan

Pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut berdasar anggapan tentang informan yang dinilai paling tahu tentang data yang diharapkan atau informan sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.¹³ Adapun informan penelitian sebagai berikut:

Pertama, Bapak Sriyanto, ST selaku Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan di Dispendukcapil. *Kedua*, Bapak Drs. Nurul Muchid, M.Si. selaku Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di DPMD. *Ketiga*, Bapak Miftahulhuda dan Zahid Kepala dan Sekertaris Desa Kandangan. *Keempat*, Sakina dan Joko warga Desa Kandangan.

4. Sumber Data Penelitian

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, 218.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan tugas adalah perlu mendapatkan data-data yang akan dianalisis. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

¹⁵Ibid. 129.

Dokumentasi adalah Metode Pengumpulan Data Yang Digunakan Untuk Menelusuri Data Historis.¹⁷ Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Adapun data yang terlampir seperti surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama yang data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

[illegible]

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Moelong mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data.¹⁸

a. Reduksi Data

¹⁸Noeng Muhjair, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996)104.

diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan penarikan kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya, setelah proses reduksi selesai dilakukan, peneliti menyajikan data secara terstruktur.

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Peneliti menginterpretasi data yang telah tersaji, kemudian merumuskan pola dan tema, melihat data dan mencoba mereduksinya kembali, sehingga proses ini merupakan proses yang interaktif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan runtutan dan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi. Agar lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan antara lain:

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Inovasi

1. Pengertian Inovasi

Pengertian inovasi pada dasarnya dapat dicari cikal bakalanya dari ajaran agama. Dalam ajaran agama, setiap manusia diminta untuk selalu berinovasi dalam menjalankan kehidupannya dalam sehari-hari. Inti dari ajaran tersebut adalah sebagai berikut. *“Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka kamu akan menjadi orang yang merugi. Tetapi kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, kamu adalah orang yang beruntung. Tetapi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka celakalah kamu”* (Hadist Nabi Muhammad).¹⁹

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Menurut Rosenfeld dalam yang dikutip Sutarno inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.²⁰ Menurut Rosabeth Moss Kanter

¹⁹Djamaludin Ancok. *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. (Jakarta:Penerbit Erlangga.2012) halaman 34.

²⁰Sutarno. *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012) halaman 134

Hampir sama dengan inovasi organisasi menurut Sutarnoyang didefinisikan sebagai cara-cara baru dalam pengaturan kerja, dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif.²² Inti dari inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau mengubah suatu produk, proses atau jasa. Inovasi organisasi mendorong individu untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan

²²*Ibid.*, 134-135

Menurut Rogers mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribut sebagai berikut²⁴:

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

²⁴*Ibid.*, 116.

b. Kesesuaian

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

c. Kerumitan

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

d. Kemungkinan Dicoba

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

e. Kemudahan diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Inovasi erat kaitannya teknologi dan informasi, khususnya internet, memiliki peranan penting dalam meningkatkan transparansi. Richard Heeks mengelompokkan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam dua kelompok, yaitu²⁵:

- a) Menghemat biaya: mengurangi biaya transaksi bagi masyarakat untuk akses ke informasi pemerintah dan mengirim informasi ke pemerintah, mengurangi biaya bagi pemerintah untuk menyediakan informasi.
- b) Menghemat waktu: mempercepat proses internal dan proses pertukaran data dengan instansi lain.
- c) Mengurangi keterbatasan: dimanapun, kapanpun informasi dan layanan pemerintah dapat diakses oleh masyarakat.
- d) Keputusan yang lebih baik: pimpinan dapat mengontrol kinerja stafnya, mengontrol kegiatan, ataupun mengontrol kebutuhan.

a) Merubah perilaku aparatur: mengurangi interes pribadi dan meningkatkan interes rasional atau nasional. Misalnya dalam mengurangi tindakan korupsi, mengurangi pemalsuan, kerja lebih efektif dan efisien

[illegible]

3. Keberhasilan Inovasi

a. Karakteristik Inovasi (Produk)

Perusahaan harus mampu mengidentifikasi secara tepat opinion leader yang akan digunakan dan mampu melibatkannya sebagai agen perusahaan untuk mempengaruhi konsumen atau masyarakat dalam menerima dan menggunakan produk baru (inovasi).

Pada umumnya sistem sosial masyarakat modern lebih mudah menerima inovasi dibandingkan dengan masyarakat yang berorientasi pada sistem sosial tradisional karena masyarakat modern cenderung mempunyai sikap positif terhadap perubahan, umumnya menghargai terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan, mempunyai perspektif keluar yang lebih baik dan mudah berinteraksi dengan orang-orang di luar kelompoknya, sehingga mempermudah masukan penerimaan ide-ide baru dalam sistem sosial dan anggotanya dapat melihat dirinya dalam peran yang berbeda-beda.

Penulis menyimpulkan bahwa suatu inovasi dikatakan berhasil maka harus memiliki empat faktor berikut, yaitu: karakteristik, adanya saluran komunikasi, adanya upaya dari agen dan dipengaruhi sistem sosial.

Agar sebuah inovasi bisa diwujudkan dengan sukses, ada sejumlah prinsip yang perlu dipahami oleh para innovator. Peter Drucker (1993) dalam bukunya *Innovation and Entrepreneurship* mengemukakan beberapa prinsip

- a. Inovasi adalah sebuah usaha sistematis dengan tujuan yang jelas. Usaha yang dilakukan dimulai dengan mengkaji peluang yang ada.
- b. Inovasi tidak hanya berdasarkan perseptual (adanya kebutuhan yang nyata seperti kasus air minum kemasan dalam kemasan botol) tetapi juga secara konseptual. Secara konseptual artinya didasari oleh perenungan yang mendalam tentang jenis produk yang kira-kira akan menjadi kebutuhan orang dan laku dijual di pasaran.
- c. Supaya inovasi berhasil, maka inovasi harus dimulai dengan ide yang sederhana, mudah, dan focus pada satu tujuan.
- d. Inovasi sebaiknya dimulai dengan inovasi kecil. Jika sudah berhasil, baru dilanjutkan dengan inovasi yang lebih besar.
- e. Dalam berinovasi jangan merasa diri pintar, karena sifat demikian akan membuat orang menjadi kurang hati-hati dalam usaha yang dilakukan. Kegagalan inovasi sering disebabkan oleh kelalaian dalam menangani hal yang kecil-kecil.

5. Hambatan Inovasi

Bagi seorang pemimpin perusahaan, inovasi dapat menjadi beban. Sebab, pada tahap awal seringkali belum cukup jelas apakah sebuah inovasi akan berhasil atau tidak. Bila inovasi yang diterapkan gagal, maka akan menjadi sebuah resiko yang merugikan perusahaan secara finansial. Selain itu,

Rosabeth Moss Kanter mengemukakan beberapa faktor yang bisa menjadi penghambat proses inovasi, antara lain sikap pemimpin. Sikap pemimpin berikut ini membuat orang malas mengemukakan gagasannya.

- a. Pemimpin yang tidak menghargai gagasan dari bawahannya, dan seringkali dicurigai. Gaya pemimpin otoriter yang merasa hanya gagasan dia yang benar biasanya akan menjadi pembunuh berdarah dingin bagi gagasan yang muncul dari bawahan.
- b. Proses birokrasi yang berbelit-belit. Setiap gagasan yang muncul dari bawah harus mendapat persetujuan atasan langsung dan atasan tidak langsung sampai ketingkat yang lebih tinggi. Beberapa gagasan inovatif yang bagus sering kali layu sebelum berkembang.
- c. Pemimpin melempar tanggung jawab dalam memberi penilaian pada gagasan inovatif. Dia meminta orang atau unit lain untuk mengkritisi sebuah gagasan inovasi. Sebagai pemimpin dia meminta si pengkritik untuk lebih melihat pada kelemahan daripada peluang gagasan untuk berhasil.
- d. Pemimpin mengkritik segi kelemahan dari setiap gagasan dan kurang menekankan pada sisi positifnya. Gaya kritik sipemimpin juga sangat berpotensi mematikan proses inovasi. Misalnya, pemimpin menyepelkan dan terkesan mengancam bawahan bahwa mereka bisa kehilangan pekerjaannya kalau gagasan mereka tidak berhasil.

²⁸*Ibid.*42-43

Sedangkan menurut Geof Mulgan dan David Albury terdapat delapan penghambat dalam tumbuhnya inovasi :

- [illegible]

Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).³¹ Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Planosebagaimana dikutip

³¹Irfan Islamy M. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) halaman 19

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino memberikan definisi kebijakan publik sebagai *“the authority allocation of values for the whole society”*. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *“authorities in a political system”* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak

[illegible]

Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat diikuti dari dua perspektif, yaitu dari proses kebijakan dan struktur kebijakan. Melalui proses kebijakan, terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari segi struktur, terdapat lima unsur kebijakan:

Tujuan kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai.

b. Masalah.

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan.

[illegible]

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-

1) Masalah kebijakan (*policy public*)

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

2) Alternative kebijakan (*policy alternatives*)

Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberikan sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

3) Tindakan kebijakan (*policy actions*)

Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

4) Hasil kebijakan (*policy outcomes*)

[illegible]

Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataanya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.

a. Identifikasi dan perumusan masalah

[illegible]

Dalam proses perumusan dan aplikasi kebijakan seringkali muncul sikap kontroversi dalam masyarakat. Pertama, sebagai akibat dari perbedaan kepentingan diantara kelompok. Kedua, karena perbedaan prioritas dari tujuan yang akan dicapai meskipun diantara mereka terdapat kepentingan yang sama. Ketiga, bersumber dari perbedaan pengertian tentang rumusan masalah sekalipun semua pihak mengalami akibat yang sama dari masalah tersebut.

Perumusan masalah biasanya dilakukan sekurang-kurangnya melalui tiga tahap, yaitu pengamatan, pengelompokan dan pengkhususan masalah. Pada tahap pertama orang akan melihat atau merasakan adanya suatu keadaan atau kejadian. Melalui pengamatan dapat dipahami latar belakang keadaan atau masalah tersebut, langkah selanjutnya adalah pengkhususan masalah sehingga dapat dibuat rumusan masalahnya.⁷

Agenda Kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan secara umum serta dengan istilah prioritas yang biasanya dimaksudkan pada susunan pokok-pokok agenda

[illegible]

ingin dicapai, asumsi yang digunakan, strategi dan pendekatan yang dipakai, serta kepada siapa saran atau rekomendasi itu akan ditujukan.¹⁰

e. Pelaksanaan Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi berkaitan dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah-langkah awal dan monitoring, serta evaluasi sebagai langkah-langkah akhir dalam rangkaian langkah-langkah kebijakan.

Berhasil tidaknya implementasi sangat ditentukan oleh langkah tersebut, sehingga pembahasan tentang langkah implementasi tidak banyak berbeda dengan pembahasan fungsi aksi tersebut.¹¹ Setelah kebijakan publik telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan tersebut.¹²

f. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan. Dalam melakukan evaluasi

¹⁰Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik*. (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), hlm 129-130

¹¹*Ibid.*, 145.

¹²Hanif Nurcholis. *Teori & Praktik Pemerintahan & Otonomi Daerah*. (Jakarta: Grasindo :2005), 268

Kemudian evaluasi akhir diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan, baik yang berasal dari kelemahan strategi, kebijakan sendiri, maupun karena kelemahan dalam implementasi.¹³ Evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk mempertanggungjawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebuah ide, gagasan, atau pun teori hanya bisa digolongkan ke dalam sebuah inovasi jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut :¹⁵

Ciri utama dari sebuah inovasi adalah khas. Inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki atau pun ada pada ide atau pun gagasan yang

¹⁵Hesti Safriatul Qudsiyah, "Inovasi Kebijakan Polisi Peduli Sesama(Studi ATM Beras Untuk Warga Miskin di Desa Ngrantrun dan Desa Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2017)"(Skripsi Tidak diTerbitkan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Ciri ke dua dari sebuah inovasi adalah baru. Setiap inovasi haruslah merupakan ide atau pun gagasan baru yang memang belum pernah diungkapkan atau pun dipublikasikan sebelumnya.

Ciri ketiga dari sebuah inovasi adalah terencana. Sebuah inovasi biasanya sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Dengan kata lain, setiap inovasi yang ditemukan pada dasarnya merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal.

Ciri terakhir yang harus ada pada inovasi adalah memiliki tujuan. Seperti yang telah dijelaskan di poin yang sebelumnya, inovasi merupakan aktivitas terencana untuk mengembangkan objek-objek tertentu (tujuannya adalah mengembangkan objek – objek tertentu).

1. Konsep Pemilihan Kepala Desa

[illegible]

Desa memiliki wewenang-wewenang yang harus dilaksanakan secara maksimal, antara lain: *pertama*, penyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. *Kedua*, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. *ketiga*, tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. *Keempat*, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya, desa berkewajiban untuk melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat sebagai upaya dalam mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya dengan penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.³⁶

Mekanisme pemilihan kepala desa saat ini diatur dalam pasal 31 undang-undang nomer 6 tahun 2014 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.pemerintah daerah Kabupaten/Kotamenetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala

³⁶ Abdul Chalik, Muttaqin Hasbibullah, dkk. *Laporan Survey Kompetisi Pelayanan Publik Tingkat Desa*. (Gresik : SAGAF. 2016) halaman 18 – 19

Pemilihan kepala desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota. Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan kepala desa. panitia pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan kepala desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.³⁷

Kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.³⁸

E-Pilkades merupakan pendataan daftar pemilih tetap menggunakan elektronik. Data daftar pemilih tetap diperoleh langsung dari masyarakat, yaitu

³⁸Lihat Pasal 29 UU No. 6 tahun 2014

Dari Daftar pemilih tetap pengambilannya melalui sistem perekaman dalam pembuatan e-Ktp di Dispendukcapil. Dalam pemilihan kepala desa, menggunakan elektronik hanya terletak pada pendataan calon pemilih saja, selebihnya masih menggunakan sistem manual. E-Pilkades ini membuat resiko kecurangan makin kecil. Karena pemilih divalidasi datanya secara elektronik dengan menggunakan sidik jari melalui alat yang bernama *fingerprint*.

uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dasar Hukum Elektronik Pilkada (E-Pilkades)

Peraturan yang dipakai Dispendukcapil dalam penerapan inovasi e-Pilkades ini, pada dasarnya berpatokan pada hukum Peraturan Daerah Gresik Nomer 12 Tahun 2015 di Bab VII pasal 110 tentang pemilihan kepala desa e-Voting dan Peraturan Bupati Nomer 27 Tahun 2016.

[illegible]

BAB III

SETTING PENELITIAN

A. DESKRIPSI UMUM DESA KANDANGAN

1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Kandangan

Secara geografis Desa Kandangan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik. Desa Kandangan berada ditinggian 9 (Sembilan) meter di atas permukaan laut atau lebih tepatnya pada 7.141534 LS/LU dan 112.481838 BT/BB.

Desa Kandangan merupakan desa pedalaman yang kecil dengan luas wilayahnya 85,085 hektar. Dengan luas sawah 73,7850 hektar, luas pemukiman 4,5 hektar, waduk/danau 1,3 hektar, tanah kas desa 5 hektar, fasilitas umum 0,5290 hektar.⁴⁰

Table 3.1

Batas Wilayah Desa Kandangan

| | |
|-----------------|---------------|
| Sebelah Utara | Desa Pandanan |
| Sebelah Timur | Desa Tumapel |
| Sebelah Selatan | Dusun Grigis |
| Sebelah Barat | Dusun Wates |

⁴⁰Profil Desa Kandangan

a) Kondisi Kependudukan

Kondisi demografis merupakan data yang meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta jumlah penduduk yang berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi dan penuaan.

a) Kondisi Kependudukan

Berdasarkan data profil desa, total jumlah penduduk yang ada di Desa Kandangan adalah 639 jiwa dengan perincian jumlah penduduk.

Tabel 3.2

Jumlah penduduk Desa Kramat

| | | |
|------------------------|-----------|-----|
| Laki-Laki | Perempuan | |
| 332 | 307 | |
| Umur | | |
| 0-17 | 18-55 | >56 |
| 140 | 490 | 9 |
| Jumlah Kepala Keluarga | | |
| 197 | | |

b) Aspek Perekonomian

Masyarakat Desa Kandungan sebagian besar bekerja sebagai petani. Kondisi lahan yang sedikit menanjak dan juga tanah yang subur wilayah ini sangat cocok untuk bercocok tanam. Akan tetapi di wilayah ini sumber air sangat sulit. Para petani mengandalkan air hujan untuk menggenangi tanaman padi mereka. Bahkan untuk mandi mereka

Desa Kandangan merupakan daerah lingkup suku Jawa, begitu juga dengan keadaan struktur sosial masyarakatnya terpengaruh oleh hasil kebudayaan. Mulai tata cara kehidupan, norma-norma dan nilai tradisi masih melestarikan kebudayaan Jawa.⁴¹ Sosial budaya merupakan suatu totalitas nilai, tata sosial, tata laku manusia yang diwujudkan dalam pandang hidup, falsafah negara dalam berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjadi asa untuk melandasi pola perilaku dan tata struktur masyarakat yang ada. Mulai tata cara kehidupan, norma-norma dan nilai tradisi masih melestarikan kebudayaan Jawa. Kondisi masyarakat tersebut dapat dilihat dari tata cara kehidupan sehari-harinya dalam bermasyarakat. Hubungan sosial di desa tersebut masih mencerminkan simbol-simbol budaya seperti rasa kegotong-royongan yang kuat dan juga sifat masyarakat yang ramah tamah dalam berinteraksi.

Sarana kesehatan yang ada di Desa Kandangan secara formal masih kurang, karenanya hanya terdapat satu puskesmas pembantu yang terdapat di Desa Kandangan.

[illegible]

Tingkat pendidikan masyarakat usia produktif Desa Kandangan umumnya adalah lulusan SMA/SMK/Sederajat. Untuk dapat melanjutkan ke tingkat SMA sangat banyak kendala yang harus dihadapi masyarakat Kandangan. Letak daerah yang pelosok mengakibatkan susah nya ekonomi dan pendidikan. Faktor ekonomi masyarakat juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Di Desa kandangan hanya ada fasilitas pendidikan sampai tingkat sekolah dasar :

Tabel 3.3

Aspek Pendidikan Desa Kandangan

| Sarana Pendidikan | Jumlah Gedung | Tamat Pendidikan (jiwa) |
|-------------------|---------------|-------------------------|
| PAUD | 1 | - |
| SD/MI | 1 | 576 |
| SMP/MTS | - | 567 |
| SMA/MA | - | 425 |
| Perguruan Tinggi | - | 7 |

f) Aspek Keagamaan

Masyarakat Desa Kandangan dipastikan keseluruhan menganut agama islam yang mayoritas penduduknya mengikuti organisasi masyarakat Nadhatul Ulama'. Adapun kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan adalah tahlilan rutin setiap malam jum'at, dan acara *Muludan* serta *Rejaban*.

Tabel 3.4

Aspek Keagamaan

| Sarana Ibadah | Jumlah |
|---------------|--------|
| Masjid | 1 |
| Surau/Mushola | 3 |

B. Pratik Elektronik Pilkades (E-Pilkades) di Desa Kandangan

Pada tanggal 29 Oktober 2017 Kabupaten Gresik melakukan pemilihan kepala desa serentak yang dilakukan di 19 desa yang berbeda dan kecamatan yang berbeda. Dalam hal ini Dispendukcapil Gresik tergerak untuk menciptakan sebuah inovasi baru yakni inovasi e-Pilkades. E-Pilkades merupakan pendataan daftar pemilih tetap yang menggunakan elektronik. Tujuan dari adanya inovasi ini yaitu

Tujuan untuk mencegah adanya calon pemilih dengan surat suara ganda dan memastikan bahwa orang yang mempunyai hak pilih saja yang bisa memilih bukan orang lain yang menggantikannya.

Dalam hal ini ada beberapa tahapan dan jadwal kegiatan pemilihan kepala desa di Desa Kandangan, antara lain :

Tabel 3.5

Tahapan dan Jadwal Kegiatan Pilkades Desa Kandangan

| No | Tahapan/Kegiatan | Tanggal | Tempat | Keterangan |
|----|--|----------------------|----------------------|------------|
| | Persiapan | | | |
| 1 | Pembentukan Panitia | 29 Agustus 2017 | Balai Desa | |
| 2 | Pengesahan Tatip | 6 September 2017 | Balai Desa | |
| 3 | Pendaftaran, penyusunan dan Daftar Pemilih Sementara | 11-18 September 2017 | Keliling Rumah Warga | |
| 4 | Penetapan DPS | 19 September 2017 | Balai Desa | |
| 5 | Pengumuman DPS | 19-22 September 2017 | Tempat Umum | |
| 6 | Pendaftaran DPS Tambahan | 25-27 September 2017 | Keliling Rumah Warga | |
| 7 | Pengumuman DPTB | 28 September 2017 | Tempat Umum | |
| 8 | Penetapan DPT | 30 September 2017 | Balai Desa | |
| 9 | Pengumuman DPT | 1 Oktober 2017 | Tempat Umum | |

| | | | | |
|----|---|----------------------|---------------|--------------------|
| | Pencalonan | | | |
| 10 | Tahap Pertama Pendaftaran | 11-22 September 2017 | Balai Desa | |
| 11 | Tahap Kedua | 25-29 September 2017 | Balai Desa | |
| 12 | Penyaringan Administrasi | 29 September 2017 | Balai Desa | |
| 13 | Penetapan Calon Kepala Desa | 30 September 2017 | Balai Desa | |
| 14 | Pengumuman Calon Kepala Desa | 1 Oktober 2017 | Tempat Umum | |
| 15 | Pengambilan Nomer Urut dan Kursi | 5 Oktober 2017 | Balai Desa | |
| 16 | Kampanye Dialogis Para Calon Kepala Dea | 14 Oktober 2017 | Tempat Umum | Mengundang Muspika |
| 17 | Penyampaian Nama-Nama Saksi Oleh Calon | 12 Oktober 2017 | Balai Desa | |
| 18 | Penyampaian Surat Panggilan | 24 Oktober 2017 | Rumah Pemilih | |
| 19 | Hari Tenang | 26-28 Oktober 2017 | Desa | Linmas |
| | Pelaksanaan | | | |
| 20 | Ceking Akhir Pengadaan Surat Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara | 22 Oktober 2017 | Balai Desa | |
| 21 | Pembuatan TPS | 28 Oktober 2017 | Balai Desa | |
| 22 | Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kandangan 2017 | 29 Oktober 2017 | Balai Desa | Mengundang Muspika |

penelitian terhadap Data Pemilih Sementara yang diterima oleh Dispendukcapil dan juga Panitia pelaksana Pilkadaes.Setelah mencocokkan data penelitian tersebut baru dijadikan sebagai Data Pemilih Tetap.

Selain itu juga dibukanya pendaftaran calon kepala desa, dan penetapan calon kepala desa di Desa kandang tahun 2017 ada 2 (dua) Kandidat, yaitu:

Tabel 3.7

Kandidat Calon Kepala Desa Kandangan Tahun 2017

| No | Nama | Umur | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|---------------|----------|---------------|--------------------------|
| 1 | Miftahul Huda | 58 Tahun | Laki-laki | Desa Kandangan RT01/RW01 |
| 2 | Abd. Fatah | 38 Tahun | Laki-laki | Desa Kandangan RT02/RW01 |

Dari tabel diatas kandidat calon Kepala Desa Kandangan nomer 1 (satu) adalah Miftahul Huda, sedangkan kandidat calon kepala desa nomer 2 (dua) adalah Abd.Fatah. Sebelum penerapan e-Pilkades di Desa Kandangan terlebih dahulu Dispendukcapil melakukan uji coba dengan memanggil 15 orang untuk menguji waktu yang diperlukan untuk melihat data yang ada di server computer dengan menggunakan *fingerprint*. Dan hasil dari ujicoba yang dilakukakn dalam waktu yang bersamaan dibutuhkan waktu 1-3 detik untuk bisa melihat data calon pemilih.

Pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan e-Pilkades alat *fingerprnt* yang disediakan Dispenduk untuk Desa Kandangan sebanyak 2 unit. Satu unit ditaruh di pintu masuk untuk mendaftarkan pemilih tetap, satunya lagi ditaruh di pintu keluar untuk memastikan pemilih bahwa benar-benar sudah memilih dan tidak dapat memilih untuk yang kedua kalinya. Dalam hal ini mekanisme atau tahap dalam menggunakan e-Pilkades pada saat pemilihan kepala desa hampir sama dengan pemilihan kepala desa dengan sistem manual.

Pemilihan kepala desa di Desa Kandangan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2017 pukul 07,00 Wibsampai dengan pukul 12.00. hasil pemilihan kepala desa di Desa Kandangan dengan menggunakan inovasi e-Pilkades dimenangkan oleh kandidat nomer 1 (satu) Miftahul Huda. Berikut ini hasil perolehan suara pemilihan kepala desa di Desa dengan menggunakan e-Pilkades;

| No | Nama Calon Kepala Desa | Perolehan Suara |
|--|------------------------|-----------------|
| 1 | Miftahul Huda | 262 |
| 2 | Abd. Fatah | 97 |
| | Suara Tidak Sah | 4 |
| Total Pemilih yang Hadir | | 363 |
| Pemilih yang Tidak Hadir (<i>Golput</i>) | | 13 |
| Jumlah Keseluruhan (DPT) | | 376 |

Dari tabel diatas jumlah pemilih tidak hadir dalam pemilihan Kepala Desa Kandungan dengan menggunakan e-Pilkades berjumlah 13 orang. Padahal pada pemilihan kepala desa sebelumnya Tahun 2011 jumlah pemilih tidak hadir diatas 20 orang. Dalam hal ini masyarakat Desa Kandungan, sangat antusias terkait penggunaan e-Pilkades dalam pemilihan kepala desa, terbukti dari jumlah pemilih yang tidak hadir yang lebih sedikit daripada pemilihan kepala desa sebelumnya. Selain menggunakan sistem e-Pilkades pada saat pemilihan Kepala

desa, Desa Kandangan juga memberikan kupon hadiah kepada warga masyarakat yang sudah memilih.⁴²

C. Pemilihan Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Adanya E-Pilkades

Pemilihan kepala desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Pemilihan kepala desa dilakukan 6 tahun sekali. Dalam proses pemilihan kepala desa seringkali terjadi kecurangan, baik dalam pendataan calon daftar pemilih maupun dalam penghitungan surat suara. Untuk itu diperlukan sebuah inovasi agar bisa mengurangi angka kecurangan pada waktu pemilihan desa berlangsung. Salah satu cara untuk mengurangi angka kecurangan yaitu dengan menerapkan inovasi e-Pilkades dalam pemilihan kepala desa. Salah satu desa yang menerapkan e-Pilkades ini yaitu Desa Kandangan.

Pemilihan Kepala Desa di Desa Kandangan sebelum diterapkannya e-Pilkades berjalan seperti biasanya. Akan tetapi panitia atau masyarakat tidak tau apakah daftar calon pemilih itu benar-benar warga masyarakat Desa Kandangan sendiri atau bukan. Karena dalam suatu desa apalagi yang terdiri dari beberapa perdukuhan pasti tidak bisa benar-benar mengenali bahwa orang itu warga asli atau bukan.⁴³ Dengan adanya inovasi e-Pilkades diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa berlangsung.

Pada pemilihan kepala desa kemarin di Desa kandang pada saat penggunaan e-Pilkades prosesnya hampir sama seperti biasanya. Akan tetapi yang membedakan hanya pada saat pendataannya saja yang menggunakan

⁴²Miftahul Huda, Wawancara, Desa Kandangan, 27 April 2018

⁴³Miftahul Huda, Wawancara, Gresik, 27 April 2018.

⁴⁴Miftahul Huda, Wawancara, Gresik, 27 April 2018.

BAB IV

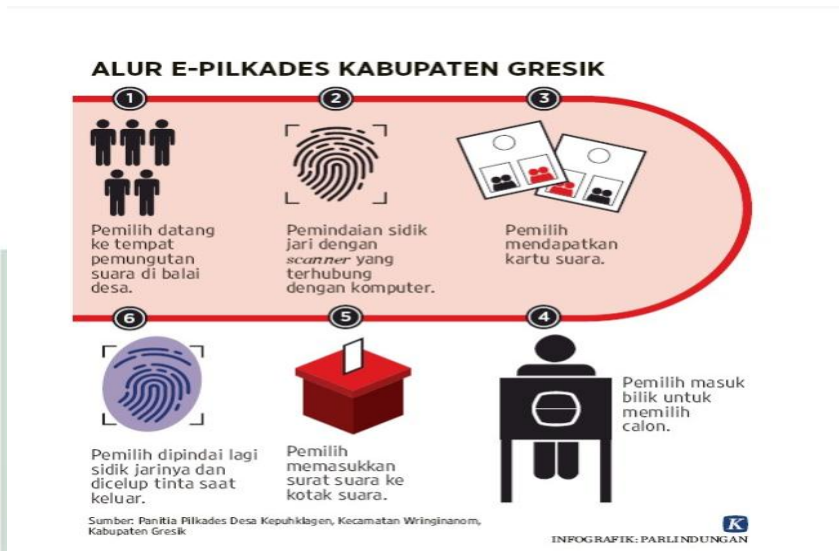
PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Proses Penerapan Inovasi E-Pilkades di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik

Pelaksanaan e-Pilkades di Kabupaten Gresik dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2017. Kabupaten Gresik merupakan Kabupaten pertama di Jawa Timur yang memakai elektronik pada saat pendaftaran/pendataan pemilih dalam pemilihan kepala desa. Proses penerapan dalam sistem e-Pilkades ini sebenarnya hampir sama dengan pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem manual/konvensional. Akan tetapi letak perbedaannya ada dipendaftaran/pendataan pemilih yang menggunakan elektronik, selebihnya seperti pencoblosan, dan penghitungan masih manual.

Dalam penggunaan sistem e-Pilkades alat yang digunakan untuk mendeteksi sidik jari pemilih yaitu *fingerprint*. Mekanisme/tahapan e-Pilkades yaitu pemilih sebelum masuk terlebih dahulu didata/didaftarkan menggunakan *fingerprint*, dan juga pada waktu sebelum keluar pemilih didata/didaftarkan lagi menggunakan *fingerprint*, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemilih tersebut sudah benar-benar memilih dan tidak akan bisa memilih lagi. Mekanisme/ tahapan e-Pilkades dalam pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan bisa dilihat dari gambar berikut ini :

Mekanisme/ Tahapan E-Pilkades Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan



<https://www.pressreader.com>

Keterangan :

Pertama, calon pemilih datang ke balai desa untuk memilih calon kepala desa. *Kedua*, pemilih akan didata melalui alat *fingerprint*. *Ketiga*, setelah data terbaca dan keluar dikomputer pemilih mendapatkan kartu suara untuk memilih. *Keempat*, setelah dapat surat suara pemilih pergi kebilik untuk mencoblos calon kepala desa yang akan dipilih. *Kelima*, setelah mencoblos pemilih memasukkan surat suara dikotak suara yang sudah disiapkan. *Keenam*, setelah memasukkan surat suara ke kotak suara pemilih sebelum keluar didata lagi menggunakan alat *fingerprint*. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemilih sudah benar-benar memilih dan tidak bisa memilih lagi.

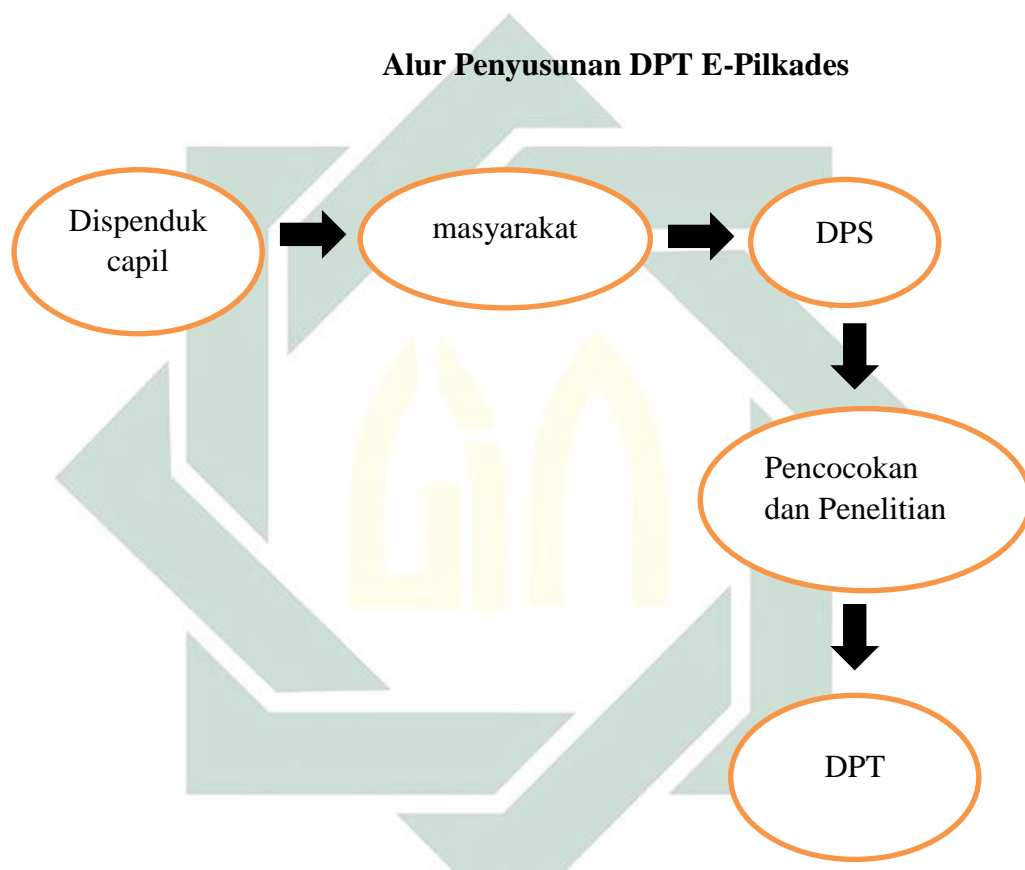
Dalam proses pelaksanaan e-Pilkades yang dijelaskan oleh Bapak Sriyanto ternyata sesuai dengan kenyataannya dilapangan. Yang sebagaimana dikatakan oleh mas Zahid selaku Sekertaris Desa Kandangan mengatakan :⁴⁶

Menurut Rosabeth Moss Kanter (1986), inovasi adalah sebuah hasil karya pemikiran baru yang diterapkan dalam kehidupan manusia.⁴⁷ Dalam hal ini Dispendukcapil mempunyai pemikiran baru dalam pendataan pemilih pada saat pemilihan kepala desa. Salah satu

⁴⁷<http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html>.

pemikirannya yaitu dengan membuat proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap dan juga progam aplikasi e-Pilkades. Berikut ini gambar diagram pembuatan Daftar Pemilih Tetap dan juga progam aplikasi e-Pilkades :

Diagram 4.1



Dari hasil wawancara tujuan dari penerapan e-Pilkades ini untuk mengurangi angka kecurangan pada saat pemilihan berlangsung. Permasalahan yang sering terjadi pada saat pemilihan kepala desa berlangsung yaitu adanya pemilih dengan surat suara ganda. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sriyanto :⁴⁹

“Tujuannya untuk mencegah adanya calon pemilih dengan surat suara ganda dan memastikan bahwa orang yang mempunyai hak pilih saja yang bisa memilih bukan orang lain yang menggantikannya.”

Dari keterangan diatas sesuai dengan teori inovasi yang menjelaskan tentang prinsip inovasi yang disarankan oleh Drucker yang mana menjelaskan inovasi adalah sebuah usaha sistematis dengan tujuan yang jelas.⁵⁰ Usaha yang dilakukan dimulai dengan mengkaji peluang yang

⁵⁰Ibid., 296

1. Tujuan Kebijakan

2. Masalah.

3. Tuntutan

[illegible]

4. Dampak

5. Sarana atau alat kebijakan.

Dari teori diatas menjelaskan ketika sebuah kebijakan atau inovasi dibuat harus ada tujuan yang ingin dicapai. Dari penerapan e-Pilkades di Desa Kandangan tujuannya sudah jelas yaitu untuk memastikan bahwa orang yang mempunyai hak pilih saja yang bisa memilih dan tidak bisa diwakilkan, danjuga mencegah adanya dengan surat suara ganda.

B. Manfaat dan Tantangan Dalam Menerapkan Inovasi E-Pilkades di Desa Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik

⁴*Ibid*, hlm 25-32.

Dari penjelasan diatas diperkuat lagi dari teori implementasi kebijakan yang mana dalam penerapannya harus memenuhi 6 kriteria antara lain :

Implementasi harus jelas standard an sasaran suatu kebijakan, termasuk implementasi kebijakan e-Pilkades. Dalam hal ini penerapan e-Pilkades dalam pemilihan kepala desa harus jelas dan terukur sehingga dapat terwujudkan. Dalam implementasi tersebut tidak memiliki ukuran dan sasaran, maka akan menimbulkan interpretasi yang mudah menimbulkan konflik diantara agen implementasi kebijakan e-Pilkades.

Untuk menerapkan e-Pilkades dalam pemilihan kepala desa membutuhkan sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia, sumberdaya material, dan sumberdaya metoda. Dalam e-Pilkades yang paling dibutuhkan adalah sumberdaya material, seperti computer yang digunakan sebagai alat memilih. Dan membutuhkan sumberdaya metoda yaitu *software* aplikasi yang digunakan untuk mengakses e-Pilkades.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Disposisi merupakan hal yang menentukan karena antara implementasi inovasi harus sesuai dengan tujuan dibuatnya inovasi tersebut. e-Pilkades dalam pemilihan kepala desa harus sesuai dengan tujuan dari adanya e-pilkades itu sendiri seperti efisiensi waktu dan anggaran, mengurangi angkas kecurangan dalam pemilihan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

7. Inovasi e-Pilkades dalam pemilihan kepala desa membutuhkan dukungan dari luar (faktor eksternal). Banyak penyebab yang akan mempengaruhi apakah inovasi e-Pilkades tersebut akan berjalan dengan baik atau tidak seperti sejauh mana dukungan masyarakat akan inovasi e-Pilkades, dukungan dari pihak pemerintah, dan kondisi ekonomi

Dari penjelasan teori diatas menjelaskan bahwasanya komunikasi antar organisasi (Dinas) dari pemerintah sangat penting. Karena dengan menjaga komunikasi antar organisasi (Dinas) perintah merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi pemerintah agar inovasi e-Pilkades tersebut bisa direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

“Kendalanya ada di kekuatan server. Kita kan membuat inovasi ini *non budget*. Jadi awalnya kami menggunakan *budget* semampu kami, kami membeli fringger yang seharga 1,5 juta yang ukurannya kecil. Tidak berukuran besar yang biasanya digunakan untuk pembuatan e-Ktp. Terus kita juga pakek server yang konvensional, terus kita juga menambah ramnya 16 gb. Awalnya ramnya cuman sedikit jadi kita modif sendiri menambah ramnya 16 gb.”

- Keengganan untuk menutup program atau organisasi yang gagal.
- Tingginya ketergantungan pada salah satu pihak sebagai sumber

[illegible]

1) Manfaat pada Tingkat Proses

- ## 2) Manfaat pada Tingkat Pengelolaan

- [illegible]

Dari wawancara diatas sesuai dengan teori kebijakan yang menjelaskan dua aktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Pertama, mutu dari kebijakan dilihat dari substansi kebijakan yang dirumuskan, hal ini dapat dilihat dari substansi kebijakan yang dirumuskan, hal ini dapat dilihat pada kebenaran mengidentifikasi masalah secara tepat artinya masalah yang diidentifikasi tidak hanya sekedar benar dalam arti masuk akal, tetapi juga dapat ditangani dilihat pada berbagai sarana dan kondisi yang ada. Kedua, ada dukungan terhadap strategi kebijakan yang dirumuskan, tanpa dukungan yang cukup, kebijakan tidak dapat terwujud. Ketika suatu kebijakan tanpa ada dukungan ataupun antusias masyarakat sebuah inovasi ataupun kebijakan tidak dapat terwujud meskipun kebijakan ataupun inovasi itu sangat bagus untuk diterapkan di masyarakat.

Tabel 4. 1**Perbandingan e-E-Pilkades dengan Pendataan Manual**

| Pendataan Manual | E-Pilkades |
|---|---|
| <p>Kelebihan :</p> <p>a. Efisiensi waktu</p> <p>Kekurangan :</p> <p>a. Pendataan daftar pemilih tetap kurang akurat.</p> <p>Model kecurangan lebih varian</p> | <p>Kelebihan :</p> <p>a. Mengurangi kecurangan pada saat pendataan daftar pemilih tetap.</p> <p>b. Kecocokan data lebih valid.</p> <p>c. Angka golput lebih pasti.</p> <p>d. Edukasi tentang teknologi Pemerintah.</p> <p>Kekurangan :</p> <p>a. Lama waktu pelaksanaan</p> <p>b. Kurangnya pemahaman masyarakat.</p> |

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa e-Pilkades dengan pendataan manual memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi jika diamati e-Pilkades lebih banyak kelebihannya dibandingkan dengan pendataan manual. Jadi kebijakan ini sudah cukup efektif untuk diterapkan meskipun ada kekurangan di beberapa point.

| | |
|---|--|
| | juga program aplikasi e-Pilkades. |
| ciri inovasi yang dimaksud oleh Rogers (1983). Beliau mengemukakan bahwa ciri dari inovasi antara lain yaitu Keuntungan relative (<i>relative advantage</i>), maksudnya yaitu tingkat yang digunakan untuk mengukur apakah inovasi itu lebih baik daripada gagasan sebelumnya atau tidak. | Dilihat dari proses pendataan Daftar Pemilih Tetap dan juga proses operasional e-Pilkades memang lebih baik dibandingkan dengan pendataan yang masih manual. Karena e-Pilkades ini dianggap lebih efisien dan juga mempunyai tujuan yang jelas. |
| prinsip inovasi yang disarankan oleh Drucker yang mana menjelaskan inovasi adalah sebuah usaha sistematis dengan tujuan yang jelas. & teori kebijakan yang menjelaskan sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat diikuti dari dua perspektif, yaitu dari proses kebijakan dan struktur kebijakan. | Ketika sebuah kebijakan atau inovasi dibuat harus ada tujuan yang ingin dicapai. Dari penerapan e-Pilkades di Desa Kandungan tujuannya sudah jelas yaitu untuk memastikan bahwa orang yang mempunyai hak pilih saja yang bisa memilih dan tidak bisa diwakilkan, dan juga mencegah adanya surat suara ganda. |

Tabel 4.3

Hasil Analisa Manfaat dan Tantangan Penerapan E-Pilkades

| Teori | Hasil Penelitian |
|---|--|
| <p>Rogers mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribut salah satunya yaitu kemudahan diamati. Maksudnya adalah sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.</p> | <p>Tapi dalam kenyataannya, pemerintah (Dispendukcapil) kurang mendalam dalam memberikan pengenalan ataupun dalam hal menguji coba e-Pilkades.</p> |
| <p>teori Inovasi menurut Geof Mulgan dan David Albury, yang menyebutkan terdapat delapan penghambat dalam tumbuhnya inovasi salah satunya yaitu, Keengganan untuk menutup program atau organisasi yang gagal.</p> <p>Dan diperkuat lagi dengan teori implementasi kebijakan yang mana dalam penerapannya harus memenuhi 6 keteria salah satunya yaitu Komunikasi antar Organisasi. Dari penjelasan teori diatas menjelaskan bahwasanya komunikasi antar organisasi (Dinas) dari pemerintah sangat penting. Karena dengan menjaga komunikasi antar organisasi (Dinas) perintah merupakan</p> | <p>adanya mis komunikasi anantara pihak BPMD dengan Dispendukcapil sehingga menjadi penyebab penghambat dalam penerapan inovasi.</p> |

| | |
|--|--|
| salah satu urat nadi dari sebuah organisasi pemerintah agar inovasi e-Pilkades tersebut bisa direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. | |
| Menurut Geof Mulgan dan David Albury terdapat delapan penghambat dalam tumbuhnya inovasi salah satunya yaitu : perancangan dan penganggaran jangka pendek. | Dalam hal ini Dispendukcapil membuat inovasi ini dengan dana yang minimal dan mereka memodif sendiri server mereka dengan menambah kapasitas ram menjadi 16 gb. |
| teori inovasi menurut Richard Heeks. Inovasi erat kaitannya teknologi dan informasi, khususnya internet, memiliki peranan penting dalam meningkatkan transparansi. Richard Heeks mengelompokkan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam dua kelompok, salah satunya menjelaskan tentang manfaat inovasi yaitu Menghemat waktu | Dalam kenyataannya dilapangan penggunaan e-Pilkades membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini dikarenakan lamanya alat diteksi sidik jari yaitu (<i>fingerprint</i>). Biarpun proses penggunaan e-Pilkades ini cukup lama masyarakat tetap mendukung untuk bisa menggunakan e-Pilkades ini sampai akhir. |
| teori kebijakan yang menjelaskan dua aktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan salah satunya yaitu ada dukungan terhadap strategi kebijakan yang dirumuskan, tanpa dukungan yang cukup, kebijakan tidak dapat terwujud. | |

PENUTUP

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juli 2018. Fokus penelitian ini tentang Inovasi E-Pilkades Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 88

B. Saran

[illegible]

- Muhjair Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Murhiyanto Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta,
- Nawawi Ismail. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*, Surabaya: Putra Media Nusantara ITS, 2009
- Nogi HeselTangkilisan. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003
- Nurcholis Hanif. *Teori & Praktik Pemerintahan & Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo :2005
- Safrotul Hesti Qudsiyah, "Inovasi Kebijakan Polisi Peduli Sesama (Studi ATM Beras Untuk Warga Miskin di Desa Ngantru dan Desa Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2017)" (Skripsi Tidak Di Terbitkan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Setiyawan Heru. "Rancang Bangun Sistem Informasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis Web (E-Pilkades)". Skripsi Tidak Di Terbitkan, (Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri, 2016)
- Sugiyono. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukma Nanda Dewi, "Efektivitas Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng". Skripsi Tidak Di Terbitkan, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).
- Sutarno. *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Suwarno Yogi. "Inovasi di Sektor Publik", Jurnal Administrasi Publik, Vo. 5 No. 2 (Agustus, 2015), 3-5.
- W. John Creswell, *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*, edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Winarno Budi. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo, 2007.
- Zainal Said Abidin. *Kebijakan Publik*. (Jakarta : Salemba Humanika, 2012)

